

# MUNDUS

Jurnal Kajian Internasional

Vol. 2, No. 2, Desember 2005

ISSN : 1829-8508

*The Impacts of Transnational Migration on National Identity*  
Nikolaus Loy

*Responding to The Reality of Socio-Political and Security Challenges  
in The Southeast Asia's Growth Triangle Areas*  
Mohd Kamarulnizam Abdullah and Mohammad Agus Yusoff

*Game Theory Sebagai Kerangka Analisis Politik Luar Negeri*  
Saptopo B Ilkodar

*Politik Luar Negeri Rusia: Mencari Identitas dan  
Peran Global Baru*  
Aryanta Nugraha

*Perubahan Lingkungan Strategis dan Peran Internasional SDF  
Jepang*  
Fauzan

*Strategi Perlawanan Nir-Kekerasan Melawan Segregasi  
Oleh Kaum Kulit Hitam di Bagian Selatan Amerika Serikat  
(1930-1965) : Sebuah Analisa berdasarkan Pendekatan Poskolonial*  
June Cahyaningtyas

*Military Build Up China dan Kekhawatiran Amerika Serikat*  
Erna Kurniawati

*Penerapan Hak-Hak Minoritas di Papua Melalui UU OTSUS  
Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*  
Aria Aditya Setiawan



Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta



# PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PERAN INTERNASIONAL SDF JEPANG

Fauzan\*

## Abstract

*Japan's involvement in United Nations Peace Mission is the reactive form of Japan's foreign policy that is driven by the external setting. The changing of strategic environment in post-Cold War East Asia's security still on going. It is triggered by the emergence of potential threats as the impact of the possibility of cutting down of the number of US troops in the Asian-Pacific region. The augmentation of China's military forces, the missile launching tests by North Korea, and other unsettled conflicts in the region, are the strong indication of that change. Meanwhile, the US pressure (gaiatsu) on Japan to do burden-sharing gets harder. This paper argues that, Those external condition have close relation with Japan's policy in sending the SDF abroad in order to show more active roles in the issues of international security.*

**Key Words:** *Japan, SDF, foreign policy, and United Nations.*

## Pendahuluan

Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan yang signifikan dalam konstelasi hubungan internasional khususnya di kawasan Asia Timur. Namun demikian, peredaan ketegangan antara blok Timur - blok Barat tidak sendirinya memberikan jaminan bagi stabilitas keamanan di kawasan, karena beberapa konflik yang ditinggalkannya masih belum terselesaikan dan bahkan memiliki potensi untuk munculnya konflik-konflik baru yang berdimensi *intra-state* di beberapa negara.

Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang terdiri dari banyak negara yang secara tradisional memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai kepentingan dan keamanan nasional, serta tidak adanya pengaturan keamanan kolektif (*collective security*)<sup>1</sup> yang terbentuk di kawasan ini. Kawasan ini juga kurang memiliki integrasi regional, dan struktur konfrontasi

Timur - Barat tidaklah semencolok seperti di Eropa sekalipun pada masa Perang Dingin. Bahkan setelah berakhirnya Perang Dingin, isu-isu seperti wilayah utara Jepang, nuklir Korea Utara, dan kepulauan Spratly masih tetap tidak terselesaikan, walaupun terdapat pergerakan ke arah peredaan ketegangan di kawasan ini, seperti pembentukan hubungan diplomatik Korea Selatan - Cina dan penandatanganan perjanjian mengenai hubungan-hubungan dasar antara Korea Selatan dan Rusia. Namun sampai saat ini, tidak ada perubahan-perubahan besar seperti yang terjadi di Eropa yang telah terjadi di wilayah sekitar Jepang.

Kawasan ini juga telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan banyak negara di kawasan ini sedang mendorong modernisasi kemampuan pertahanan nasional mereka dengan meningkatkan pembelanjaan untuk pertahanan dan menggunakan senjata-

---

\* Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta (fauzan\_dj@yahoo.com)

senjata dengan performa tinggi.

Pasukan Rusia di Timur Jauh secara umum menunjukkan kecenderungan menuju pengurangan kuantitatif dan aktivitas mereka menjadi berkurang, yang mencerminkan kondisi domestik Rusia yang serius. Namun modernisasi persenjataan, termasuk transfer peralatan baru dari Eropa, masih terus berlangsung. Dengan adanya ketidakpastian dalam masa depan kekuatan Rusia, menjadikannya sebagai salah satu faktor ketidakstabilan di kawasan ini.

Sementara itu, Semenanjung Korea masih merupakan salah satu area militer paling tegang di dunia. Meskipun tengah menghadapi masalah ekonomi yang serius, Korea Utara sedang mengembangkan dan melakukan uji coba rudal balistiknya serta adanya dugaan kuat bahwa Korea Utara juga mengembangkan persenjataan nuklirnya. Kekhawatiran terhadap Korea Utara semakin kuat ketika Korea Utara mengumumkan untuk menarik diri dari NPT (*Non-proliferation Nuclear Treaty*) pada Maret 1993. Karena hal ini dapat menjadi faktor baru bagi peningkatan ketegangan di semenanjung ini. Meskipun kemudian dalam pembicaraan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Korea Utara, Korea Utara mengumumkan pada bulan Juni 1993 bahwa Korea Utara akan menanggukahkan penarikan dirinya dari NPT dan akhirnya tetap terikat dalam perjanjian ini untuk beberapa waktu. Namun, Korea Utara masih belum sepenuhnya menarik keputusannya untuk mundur dari NPT. Kecurigaan terhadap pengembangan senjata nuklir Korea Utara dan rencana Korea Utara untuk memperpanjang jangkauan rudalnya (*surface to surface*), serta ekspor rudal-rudalnya ke kawasan Timur Tengah merupakan

penyebab kekhawatiran di kalangan komunitas internasional.

Sebagai kekuatan nuklir, Cina dengan luas wilayah dan penduduk yang besar akan mampu memiliki efek yang besar pada keamanan di kawasan ini. Cina, sambil mendorong reformasi dan kebijakan pintu terbuka (*open-door policies*), telah menunjukkan posisinya untuk secara aktif mendorong modernisasi kemampuan pertahanannya. Sejak krisis Teluk, Cina memberikan perhatian penting pada modernisasi peralatan militer, khususnya untuk angkatan laut (AL) dan angkatan udara (AU). Meskipun kecepatan modernisasi tersebut masih lambat, namun hal tersebut tetap saja membuat khawatir negara-negara di sekitar Cina.

Sementara itu, beberapa negara Asia Timur lainnya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan perubahan lingkungan strategis keamanan mereka, semakin menambah pengeluaran pertahanan dan pembelian senjata-senjata baru. Fenomena pembangunan senjata (*arms build up*) di Asia Timur ini sangat terkait dengan reaksi negara-negara Asia terhadap situasi di atas, dan juga reaksi mereka terhadap kekhawatiran bahwa penarikan militer Amerika Serikat dari kawasan ini akan menimbulkan ketegangan dan konfrontasi di antara negara-negara di kawasan.

Dengan alasan untuk mengantisipasi tantangan-tantangan seperti disebutkan di atas, kebanyakan negara di kawasan ini telah memulai suatu perlombaan senjata (*arms race*)<sup>2</sup> yang seringkali diselubungi dengan penjelasan sebagai "pensejajaran" (*catching up*) atau "modernisasi berlanjut" (*ongoing modernization*) untuk kekuatan militer

mereka.<sup>3</sup> Namun terdapat juga faktor-faktor pendorong perlombaan senjata yang lain, seperti perlunya menertibkan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan jalur komunikasi laut (SLOC-*Sea Lanes of Communications*) dan juga untuk mempertahankan klaim teritorial mereka. Dalam beberapa kasus, faktor lain adalah masalah prestise yang dikaitkan dengan kepemilikan sistem persenjataan yang maju dan modern. Akuisisi persenjataan ini juga dipicu oleh peningkatan kemakmuran di hampir semua negara di kawasan dan kemampuan untuk membeli persenjataan yang mahal dan canggih. Situasi di Asia Timur yang sangat kompleks ini adalah situasi yang oleh Barry Buzan disebut sebagai *security complex*.<sup>4</sup>

Dengan latar situasi keamanan di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana perubahan lingkungan strategis di Asia Timur dan persepsi Jepang yang pada akhirnya mempengaruhi politik luar negeri Jepang khususnya yang berkaitan dengan peran SDF (*self-defence forces*) Jepang dalam misi perdamaian PBB.

**Lingkungan Strategis Keamanan Kawasan Runtuhnya Uni Soviet yang menandai berakhirnya Perang Dingin, kawasan Asia Timur dihadapkan pada struktur keamanan baru yang ditandai dengan perubahan perimbangan kekuatan dan persepsi ancaman yang baru, dimana Jepang harus mengkaji kembali jenis peran apa yang akan dimainkan dalam struktur internasional yang mengalami perubahan tersebut. Jepang juga harus memutuskan apakah kebijakan keamanannya, yang didasarkan pada dua pilar yaitu aliansi Amerika Serikat - Jepang dan *peace constitution*, akan tetap relevan dengan era yang baru. Lingkungan strategis**

keamanan kawasan yang tidak stabil ditandai dengan potensi ancaman seperti rencana pengurangan pasukan Amerika Serikat, peningkatan militer Cina, masalah uji coba rudal Korea Utara dan beberapa konflik lama yang belum terselesaikan.

#### a. Pengurangan Pasukan Amerika Serikat

Keseriusan potensi ancaman bagi Jepang diawali dengan kemungkinan pengurangan secara signifikan militer Amerika Serikat di Asia Timur, dan sebagai akibatnya, akan menghilangkan jaminan keamanan Amerika Serikat pada Jepang. Walaupun aliansi Amerika Serikat - Jepang telah diperkuat dan Amerika Serikat telah menegaskan untuk tetap mempertahankan sekitar 100.000 tentara yang ditempatkan di Asia Timur. Dikarenakan menurunnya ancaman Rusia, Jepang dihadapkan dengan kemungkinan pengurangan pasukan Amerika Serikat. Hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan domestik di Amerika Serikat, dan keengganan Jepang untuk melakukan perubahan dan mengambil peran yang lebih besar dalam berbagi beban (*burden sharing*) keamanan di Asia Timur. Masalah ini diperburuk dengan protes publik Jepang atas besarnya jumlah personil militer Amerika Serikat di Jepang, terutama di Okinawa yang menjadi pangkalan militer bagi pasukan Amerika Serikat yang jumlahnya tidak proporsional dengan penduduk setempat.<sup>5</sup> Kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Timur merupakan faktor penting dalam menentukan situasi keamanan di kawasan. Kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan ini yang dimulai sejak masa Perang Dingin dimaksudkan untuk melindungi kepentingan strategisnya terhadap ancaman Uni Soviet. Namun dengan jatuhnya Uni Soviet telah personil

menimbulkan perubahan dalam kepentingan strategis Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Pasifik yang sebelumnya menjadi salah satu poin strategi paling penting untuk Amerika Serikat dalam memelihara keseimbangan strategi global terhadap Uni Soviet.

Kebijakan pengurangan pasukan Amerika Serikat dari kawasan Asia Pasifik dimulai sejak pemerintahan George Bush. Pemerintah Bush memulai proses pengurangan bertahap kekuatan militer Amerika Serikat di Asia dalam suatu konteks kebijakan yang dirancang untuk memberikan pembenaran baik di dalam negeri (domestik Amerika Serikat) maupun di Asia mengenai kelanjutan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kebijakan Bush tersebut bertolak belakang dengan pendahulunya, Ronald Reagan yang telah memodernisasi dan menambah pasukan Amerika Serikat di Asia untuk menghadapi kemungkinan agresi, terutama dari Uni Soviet. Selama delapan tahun pemerintahan Reagan (1981-1988), jumlah pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri mengalami peningkatan dari 126.000 menjadi 136.000, termasuk sekitar 25.000 personil di laut.<sup>6</sup> Pasukan-pasukan tersebut dibangun berdasar kerangka kerja utama unit-unit yang ditempatkan diluar negeri, yaitu Armada ke-7, Angkatan Udara ke-5 dan Pasukan Ekspedisi Marinir ke-3 di Jepang; Divisi Infanteri ke-2 dan Angkatan Udara ke-8 di Korea Selatan; dan fasilitas logistik Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Subic dan Angkatan Udara ke-13 di pangkalan militer Clark, Filipina. Selama tahun 1980-an, Armada ke-7 Amerika Serikat diperkuat dengan penambahan kapal penjelajah kelas *Ticonderoga*, pesawat tempur F-18 *Hornet*, dan rudal penjelajah *Tomahawk*. Unit-unit

angkatan udara di Korea Selatan dan Jepang ditingkatkan dengan pesawat pembom F-16 *Falcon* dan peningkatan pesawat tempur F-15C *Eagle*. Divisi ke-2 di Korea Selatan menerima MBT (*main battle tanks*) M-1 *Abrams* dan kendaraan lapis baja tempur infanteri M-2/3 *Bradley*.<sup>7</sup>

Pada akhir 1989, Kongres Amerika meminta laporan Departemen Pertahanan mengenai "*specific ways our Asian allies can increase their participation in regional stability and how we can reduce and restructure our military presence in East Asia.*"<sup>8</sup> Kemudian pada April 1990, Departemen Pertahanan merespon dengan suatu laporan yang secara formal dikenal dengan *East Asia Strategic Initiative* (EASI), yang menjadi acuan kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan reorganisasi dan restrukturisasi terhadap keberadaan pasukan Amerika Serikat di Asia Timur. Laporan tersebut menyebutkan tiga perkembangan yang melatarbelakanginya, yaitu (1) menurunnya ancaman Uni Soviet; (2) meningkatnya sentimen nasionalis di kawasan Asia Pasifik yang mengarah pada ketidaksukaan terhadap kehadiran pasukan Amerika Serikat; dan (3) pertimbangan domestik, termasuk persepsi publik Amerika tentang berkurangnya ancaman Uni Soviet dan tekanan fiskal yang berkisar pada peningkatan defisit anggaran Amerika Serikat.<sup>9</sup>

Dalam implementasi EASI, Amerika Serikat akan melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi kekuatan militernya di kawasan Asia Timur dalam tiga tahap. Tahap I (1-3 tahun), telah dilakukan pengurangan 15.250 personil seperti yang direncanakan, termasuk 7000 personil dari Korea Selatan, 5000-6000 personil dari Jepang (termasuk Okinawa), dan kemungkinan 2000

dari Filipina. Tahap II (3-5 tahun), pengurangan sejumlah personil yang ditempatkan di Jepang akan dilaksanakan bersamaan dengan pengurangan jumlah pesawat tempur F-15 yang ditempatkan di Okinawa. Namun, dijelaskan bahwa pengurangan pasukan di Korea Selatan akan ditangguhkan sampai bahaya dan ketidakpastian pengembangan nuklir Korea Utara telah hilang. Tahap III (5-10 tahun), akan dilakukan pengurangan pasukan lebih jauh, namun akan tetap menyesuaikan dengan situasi yang ada.<sup>10</sup> Selain tahap I tidak ada angka khusus yang disebutkan. Namun pada April 1992, pemerintahan Bush meng-*update* strategi Amerika Serikat untuk kawasan Asia Pasifik, yang disebut sebagai EASI II. Pada laporan EASI II ini memberikan perhitungan lebih rinci mengenai rencana pengurangan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan Asia Pasifik (seperti ditunjukkan pada tabel 1). Laporan EASI II lebih spesifik daripada EASI I, dengan menyebutkan sumber-sumber ketidakstabilan kawasan seperti kemungkinan perang di Semenanjung Korea, transisi kepemimpinan Cina dan penjualan rudal-rudalnya, potensi konflik di selat Taiwan, perang di Kamboja, kekerasan oleh kelompok komunis di Filipina, dan konflik yang disebabkan klaim atas wilayah kepulauan di Laut Cina Selatan oleh beberapa negara.

Pada akhir 1992, level tentara Amerika Serikat diperkirakan akan turun sebesar 15.250 personil. Namun, untuk pengurangan ini ditambah pengurangan lain sebesar 8.300 personil menyusul keputusan pemerintah Filipina pada akhir 1991 untuk mengakhiri hubungan hampir selama 100 tahun keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina. Angkatan Udara

ke-13 yang jauh lebih kecil dipindahkan dari pangkalan Clark ke Guam, dan pesawat-pesawat tempur F-15 yang rencananya akan ditempatkan di Clark dipindahkan ke Alaska. Menyusul selesainya penarikan pasukan Amerika Serikat dari Filipina pada November 1992, pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri menurun menjadi 109.440 pada tahun 1993. Tahap dua rencana pengurangan merinci penambahan jumlah pengurangan menjadi 102.240 tentara Amerika Serikat di Asia pada tahun 1995.<sup>11</sup>

Kedua laporan EASI juga menetapkan keinginan Amerika Serikat untuk meminta kontribusi sekutu yang lebih besar pada beban pertahanan di Asia. Pada akhir fase ketiga, EASI memperkirakan bahwa Korea Selatan akan mengambil peran utama dalam pertahanannya sendiri. Namun, di Korea Selatan, perencanaan fase dua yang direncanakan untuk 6.500 tentara ditunda oleh keputusan pada November 1991 antara Washington dan Seoul untuk menunjukkan keteguhan dalam upaya-upaya diplomatik untuk membatasi program senjata nuklir Korea Utara.<sup>12</sup> Namun, langkah-langkah ini menunda percepatan transisi bagi komando Korea Selatan dari pasukan gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan, dan penarikan Divisi Infanteri ke-2 Amerika Serikat dari DMZ (*demilitarized zone*).

Menurut laporan EASI II, pada 1995 Korea Selatan akan membayar sepertiga biaya penempatan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan, yang diperkirakan mencapai US\$ 900 juta pada tahun 1995. Dalam kaitannya dengan Jepang, EASI I mengatakan Washington akan mengupayakan agar Jepang meningkatkan bagiannya untuk biaya penempatan tentara

Tabel 1.

**EASI II (1992): Tahapan Rencana Pengurangan Pasukan AS dari Asia Timur**

Negara dan Angkatan	Kekuatan awal 1990	Pengurangan Tahap I 1990-92	Penarikan dari Filipina	Kekuatan 1993	Pengurangan Tahap II 1992-95	Kekuatan 1995 (kira-kira)
JEPANG	50.000	4.773		45.227	700	44.527
Angkatan Darat	2.000	22		1.978		1.978
Angkatan Laut	7.000	502		6.498		6.498
Marinir	25.000	3.489		21.511		21.511
Angkatan Udara	16.000	560		15.440	700	14.740
Markas Gabungan	44.000	6.987		37.000	6.500	30.913
	32.000	5.000		27.000		27.000
	400			400		400
Korea	500			500		500
Angkatan Darat	11.500	1.987		9.513		9.513
Angkatan laut	14.800	3.490	11.310			
Marinir	200		200			
Angkatan Udara	5.000	672	4.328	relokasi di tempat lain		
	900		900			
	8.700	2.818	5.882			1.000
Filipina						
Angkatan Darat	109.20		11.310	1.000	7.900	76.440
	0					25.800
Angkatan Laut	25.800			83.640		102.24
Marinir	135.00			25.800		0
Angkatan Udara	0			109.440		
TOTAL						

Sumber: *A Strategic Framework for the Asian Pacific Rim: Report to Congress 1992*, US Department of Defense, hal. 22.

Amerika Serikat di Jepang dari 35 menjadi 40 persen. Pada laporan EASI II, bagian yang harus dibayar Jepang meningkat menjadi 75 persen.<sup>13</sup>

Berkurangnya kehadiran militer Amerika Serikat tentunya menimbulkan kekhawatiran Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya akan munculnya suatu kekosongan kekuatan (*power vacuum*), dan kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh negara-negara tertentu untuk menggunakan kekuatan militer mereka dengan alasan melindungi kepentingan mereka masing-masing.<sup>14</sup> Bagi Jepang, pengurangan pasukan Amerika

Serikat dari Jepang berarti bahwa Jepang akan harus lebih sedikit mengandalkan jaminan keamanan Amerika Serikat dan mempertimbangkan penyediaan militer demi kebutuhan keamanannya sendiri.

#### b. Peningkatan Militer Cina

Masa depan Cina mungkin merupakan tantangan yang paling sulit bagi kebijakan luar negeri dan keamanan Jepang, seperti halnya bagi keseluruhan negara-negara Asia dan kekuatan-kekuatan luar yang terlibat dalam masalah keamanan di Asia. Cina merupakan negara yang sedang berkembang

dengan cepat, negara pengembang nuklir, kekuatan militer regional terkemuka, dan juga kekuatan global berkat kursi tetap di Dewan Keamanan PBB.

Cina mulai berupaya untuk mengembangkan sendiri senjata nuklir sejak tahun 1950-an untuk mendapatkan penangkal dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam komunitas internasional. Cina telah mengembangkan beberapa ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*) yang mampu menjangkau wilayah Eropa Timur dan Amerika Serikat.<sup>15</sup> Cina juga memiliki sekitar 100 IRBM (*Intermediate Range Ballistic Missile*) dan MRBM (*Medium Range Ballistic Missile*) yang mampu menjangkau wilayah Timur Jauh Rusia dan Asia, serta memiliki sekitar 120 pesawat pembom jarak menengah TU-16. Cina diperkirakan memiliki rudal balistik jarak menengah (IRBM) jenis baru. Cina juga sedang mengembangkan SLBM (*Submarine-Launched Ballistic Missile*) dan diyakini memiliki senjata nuklir taktis dan sedang meningkatkan serta melakukan diversifikasi kekuatan nuklirnya.

Program persenjataan ini menimbulkan kekhawatiran dikarenakan kesuksesan kepemimpinan Cina yang belum terselesaikan, konflik teritorial di Laut Cina Selatan yang belum terselesaikan, isu reunifikasi dengan Taiwan yang belum terselesaikan, kecenderungan penggunaan pendekatan *zero-sum game* dari para pemimpin Cina terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan, persepsi Cina tentang keharusan untuk mendapatkan kembali harga diri dan tempat baik pada tataran global maupun regional, kesenjangan persepsi yang besar antara persepsi diri para elit politik mengenai Cina yang damai dengan persepsi dari para negara tetangga Asiana,

dan catatan masa lalu Cina dalam penggunaan kekuatan militer untuk mendapatkan tujuan-tujuan politiknya.<sup>16</sup>

Di satu pihak, perkembangan ekonomi Cina memberikan harapan untuk adanya suatu kebijakan luar negeri yang moderat yang memperhitungkan semakin meningkatnya interdependensi internasional Cina. Di pihak lain, tidak ada kepastian historis yang setara yang menjamin hasil yang baik dari perkembangan ekonomi tersebut. Kemakmuran yang lebih besar bisa juga memberi kesinambungan pada suatu kebijakan luar negeri dan pertahanan yang lebih keras, khususnya jika memandang catatan sejarah Cina dengan pengalaman imperialisme dan penggunaan kekuatan di masa lalu.<sup>17</sup>

Pertumbuhan secara signifikan dalam belanja pertahanan Cina sejak awal 1990-an dan akuisisi persenjataan *high-profile* terbaru berupa persenjataan maju Rusia oleh PLA (*People's Liberation Army*) telah menciptakan banyak kekhawatiran. Di saat kekuatan-kekuatan besar lain sedang mengurangi anggaran pertahanannya, Cina justru menambah belanja militer tahunannya dengan tingkatan dua digit selama 6 tahun terakhir.<sup>18</sup> Walaupun angka anggaran pertahanan resmi Cina untuk 1995 adalah senilai US\$ 7.5 milyar, para analis Barat memperkirakan bahwa pengeluaran tahunan PLA sebenarnya jauh lebih tinggi, berkisar antara US\$ 12 milyar sampai US\$ 40 milyar, dan bahkan bisa setinggi US\$ 140 milyar.<sup>19</sup>

Bubarnya Uni Soviet dan penarikan bertahap kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik, maka upaya modernisasi pertahanan Cina dianggap

sebagai suatu kampanye terencana oleh PLA untuk mengubah pasukan militernya menjadi suatu kekuatan regional, bahkan mungkin juga global. Arah kebijakan militer Cina akan sangat mempengaruhi tidak hanya situasi keamanan Asia Timur, namun juga situasi keamanan dunia. Bahkan pemerintah Amerika Serikat pada Mei 2000 mengeluarkan suatu laporan mengenai Cina sebagai musuh potensial pada abad ke-21.<sup>20</sup> Akhir-akhir ini angkatan udara Cina juga sedang melakukan modernisasi pesawat-pesawatnya dengan mengembangkan dan menggunakan jenis baru pesawat tempur seperti F-8 II dan memperbaiki pesawat terbang lain dengan memperbaharui avionik. Sejak tahun 1992, Cina telah mendapatkan sejumlah senjata dan teknologi yang maju dari Rusia. Cina membeli pesawat tempur SU-27 (*Sukhoi*), 10 pesawat transport *Ilyushin* II-76, dan 2 helikopter perang anti kapal selam *Kamov* (Ka-27 Helix A).<sup>21</sup>

Cina juga menunjukkan minat pada pesawat tempur MiG-29 (*Fulcrum*), pesawat pencegat MiG-31 (*Foxhound*), pesawat Su-24, mesin pesawat *Klimov* RD-33 (yang menjadi mesin MiG-29 *Fulcrum*), dan sejumlah sistem radar peringatan dini jarak jauh (AWACS, *Airbone Warning and Control Systems*) dan pesawat kontrol dan peringatan serangan udara A-50. Cina juga sedang bernegosiasi dengan Rusia untuk pembelian sekitar 100 sampai 150 sistem rudal pertahanan udara SA-10 *Grumble* (S-300).<sup>22</sup> Cina dilaporkan juga telah membeli empat rangkaian peluncur S-300 dan sekitar 60 rudal untuk pengujian.<sup>23</sup> Selain itu, Rusia telah menawarkan pada Cina penjualan pesawat pengebom jarak jauh *Bakfire* Tu-22M. Terdapat banyak laporan bahwa Cina telah setuju untuk membeli 440 MBT T-72M dan 70 kendaraan BMP.<sup>24</sup> Lebih jauh lagi, angkatan laut Cina akhir-akhir ini

mencapai suatu kesepakatan untuk membeli 4 kapal selam konvensional kelas *Kilo* dari Rusia, dan setidaknya dua di antaranya telah dikirimkan.<sup>25</sup>

Jepang dihadapkan dengan kebangkitan Cina sebagai pemain kunci dalam struktur internasional yang baru di kawasan. Kebangkitan Cina yang tidak bisa dihindarkan sebagai kekuatan ekonomi yang terbesar di Asia secara logis akan memainkan peran militer yang lebih besar di masa mendatang. Walaupun hubungan Cina - Jepang ditandai dengan kerjasama yang terus berkembang dalam bidang ekonomi, namun hubungan politiknya dinodai dengan saling tidak percaya dan kecurigaan dikarenakan masalah-masalah yang belum terselesaikan seperti pertikaian masalah wilayah atas kepulauan Senkaku (*Diaoyu*), penguatan aliansi keamanan Amerika Serikat - Jepang, dan kesepakatan mengenai proyek TMD (*Theater Missile Defense*) antara Amerika Serikat - Jepang. Cina diidentifikasi sebagai salah satu ancaman utama yang harus diperhatikan oleh Jepang. Kekhawatiran yang utama adalah pengembangan rudal jarak jauh *Dongfeng-21* dan peningkatan aktifitas kapal laut Cina di dekat perairan wilayah Jepang.

### c. Uji Coba Rudal Korea Utara

Salah satu ancaman jangka pendek utama bagi Jepang pada era pasca Perang Dingin adalah ancaman nuklir Korea Utara. Besarnya ancaman tersebut terwujud tidak hanya oleh sifat rezim Korea Utara yang susah ditebak namun juga oleh sikap provokatif Korea Utara. Korea Utara diyakini telah, sejak pertengahan 1980-an, memproduksi dan menempatkan rudal-rudal tipe *Scud B* dan juga tipe *Scud C*, yang merupakan modifikasi dari *Scud B* dengan

jangkauan yang lebih jauh, dan bahkan telah mengeksponnya ke Timur Tengah. Pada Mei 1993, Korea Utara telah berhasil mengembangkan senjata nuklirnya dan telah melakukan uji coba peluncuran terhadap *Rodong-1* yang bisa menjangkau 1000 km. Jika rudal *Rodong-1* berhasil dikembangkan, rudal ini akan menjangkau bagian barat dan bagian lain wilayah Jepang dan, bergantung lokasi penempatannya, mungkin sebagian besar wilayah Jepang.

Diketahui luas bahwa program rudal Korea Utara telah dikembangkan dengan bantuan dari Rusia dan Cina, dengan menerima dukungan teknis dari teknisi dan spesialis yang sebelumnya telah bekerja

untuk Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas blok Soviet.<sup>26</sup> Korea Utara atas usahanya sendiri telah mengoperasikan beberapa organisasi di bawah *Second Economic Committee* yang utamanya berurusan dengan industri pertahanan di Korea Utara, dan diasumsikan telah melewati gerbang *technical plateau* di bidang pengembangan rudal.<sup>27</sup> Tabel 2 menggambarkan status pengembangan rudal Korea Utara saat ini.

Menurut Buku Putih Pertahanan Korea Utara tahun 1998, rudal *Scud* dan *Rodong-1* Korea Utara sudah siap digunakan dan ditempatkan di dekat DMZ. Para pejabat pemerintah Korea Selatan telah mengumumkan bahwa Korea Utara juga

Tabel 2

**Kemampuan Rudal Korea Utara**

Kelas	Nama (alternatif nama)	Jangka uan Maks. (km)	Hulu Ledak (kg)	Tingk at	Panjan g (m)	Diamet er (m)	Berat (tons)	DPR K IOC *
SRBM	Hwangsong-5 (Scud Mod.-5, Scud-B)	320-340	1.000	1	11.16	4.88	45.86	1985
SRBM	Hwangsong-6 (Scud Mod.-C, Scud-C, Scud-PIP)	500	770	1	11.3	.88	45.93	1989
MRBM	Rodong (Rodong-1, Rodong-1, Scud Mod.-D, Scud-D)	1.350	1.200	1	17.4	1.32	16.25	1997
IRBM	Taepodong-1 (Taepodong-1, Rodong-2, Scud X, Scud Mod.-E, Rodong-2)	1.500 2.200	700 1.000	2	27.3 (163/11 )	1.32/8 84	20.4	1998
ICBM	Taepodong-1 SLV	4000	50- 100	3	27.9 (1.63/8. 1/3.5	1.32/8 84/.88 4	19.9	1998
ICBM	Taepodong-2 (Taepodong-2, Rodong-3)	4.000 6.000	700 1.000	2 3	5.4 (18/17. 4)	2.4/1.3 3	69.4	2000
		6.000+	100- 500					

\* IOC : Inition Operational Capability

Sumber: *Jane's International Defense Review*, July 1999, dalam Jung-Hoon Lee and Il Hyun Cho, "The North Korean Missiles: A Military Threat or Survival Kit?," *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. XII, No. 1 (Summer 2000), hal 137.

mengoperasikan empat brigade rudal *Rodong*, satu di Sinori propinsi Pyong-anbuk-do dan tiga di Pyongsan-gun propinsi Hwanghaebuk-do.<sup>28</sup> Satu brigade *Rodong* terdiri dari 9 peluncur. Rudal ini bisa menjangkau hampir semua bagian wilayah Korea Selatan dan Jepang. Dengan rudal berjangkauan 1.500 km, Korea Utara menunjukkan suatu ancaman jelas bagi sekutu-sekutu Amerika Serikat dan kepentingan mereka di kawasan tersebut. *US National Intelligence Officer* Robert Walpole, dalam menilai ancaman rudal Korea Utara, menyatakan bahwa dengan kemampuan persiapan tiga tahap dan pengisian ulang penerbangan jangkauan ICBM, dimungkinkan terdapat suatu SLV *Taepodong-1* yang diisi dengan muatan ringan yang bisa mencapai daratan Amerika Serikat dalam waktu 15 tahun ke depan.<sup>29</sup> Secara keseluruhan, peluncuran tersebut jelas menunjukkan bahwa Korea Utara sekarang mempunyai kemampuan kredibel untuk menyerang setiap fasilitas militer Amerika Serikat di sekitar Jepang dan di Okinawa. Uji coba tersebut juga mewakili kejadian pertama di mana suatu negara yang bermusuhan menunjukkan kapasitas potensial untuk mencapai daratan Amerika Serikat dengan satu rudal WMD (*weapons of mass destruction*).

Kemudian pada 31 Agustus 1998, Korea Utara kembali meluncurkan sesuatu yang dicurigai sebagai rudal di atas Jepang, yang bagian-bagiannya masuk ke dalam laut Jepang.<sup>30</sup> Kejadian ini mendapat reaksi yang keras dari Jepang, karena rudal tersebut melanggar wilayah udara Jepang dan menandakan sejauh mana perkembangan kemampuan rudal Korea Utara. Keamanan Jepang juga terancam oleh kapal mata-mata Korea Utara yang menerobos ke perairan Jepang. Contohnya, pada 22 Desember 2001,

penjaga pantai Jepang terlibat kontak senjata dengan kapal yang dicurigai sebagai kapal mata-mata Korea Utara, yang mengarah pada tenggelamnya satu kapal di Laut Cina Timur. Buku Putih Pertahanan Jepang tahun 2000 menyatakan bahwa Korea Utara harus diamati dengan cermat walaupun terdapat tanda-tanda yang menjanjikan untuk peredaan ketegangan di Semenanjung Korea.<sup>31</sup>

### Tekanan Amerika Serikat (*Gaiatsu*)

Faktor eksternal lain yang sangat berpengaruh terhadap Jepang dalam kebijakan pengiriman SDF ke luar negeri dalam misi perdamaian PBB adalah adanya tekanan dari Amerika Serikat (*gaiatsu*) untuk pembagian beban (*burden sharing*) terutama pada saat meletusnya krisis Teluk 1990. Meskipun sebenarnya masalah *burden sharing* telah lama muncul dalam hubungan Amerika Serikat-Jepang.

Penurunan relatif perekonomian Amerika Serikat dan munculnya Amerika Serikat sebagai negara penghutang nomor satu pada tahun 1980-an, dan pada saat yang sama bangkitnya Jepang pada dua dekade terakhir, telah menambah ketegangan pada perdebatan bilateral mengenai *burden sharing* yang telah lama menjadi masalah tersendiri sejak 1950-an, ketika kedua negara memulai p e m b a h a s a n - p e m b a h a s a n y a n g menghasilkan *US-Japan Mutual Security Treaty*.<sup>32</sup> Pada traktat tersebut, yang kelihatannya merupakan suatu kesepakatan untuk bekerja sama guna menahan komunisme di Timur Jauh dengan memberikan hak bagi Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militernya di Jepang, memunculkan isyarat konflik berkelanjutan mengenai *burden sharing* militer kedua negara.

Dalam hubungan kedua negara, *burden sharing* merupakan suatu isu penting karena menjadi dasar utama dalam menetapkan agenda kerjasama pada era pasca perang. Isu-isu yang berkaitan dengan *burden sharing* tentunya berbeda-beda bergantung pada perspektif mana yang diambil. Bagi para ahli teori hubungan internasional, pertanyaan-pertanyaan kunci adalah negara mana yang akan mengambil kepemimpinan, jenis *reward* dan *insentive* apa yang dibutuhkan untuk memenangkan kerjasama dan untuk mengatasi kecenderungan para negara untuk menjadi *free rider*, dan bagaimana tanggung jawab dibagi sejak pertama. Bagi para pengambil kebijakan di Amerika Serikat - negara yang sudah menanggung bagian yang tidak proporsional - masalahnya adalah bagaimana cara menjaga kekuasaan sambil mengurangi beban. Sementara bagi Jepang - negara yang ada dalam tekanan untuk membayar lebih banyak - masalahnya adalah bagaimana untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan meminimalkan biaya.<sup>33</sup> Dalam perkembangannya, masalah *burden sharing* selalu menjadi kajian dan perdebatan dalam hubungan Amerika Serikat - Jepang (*Nichibei*).

Perang Teluk (1990) kembali menunjukkan ketidaksesuaian pendekatan Amerika Serikat dan Jepang pada aliansi bilateral mereka. Dimulai segera setelah berakhirnya konfrontasi Perang Dingin di Eropa, krisis Teluk tersebut mengagetkan kebanyakan negara di dunia, namun reaksi di Tokyo mungkin lebih membingungkan dibandingkan di negara-negara lain. Kepemimpinan LDP (*Liberal Democratic Party*) yang sedang berkuasa tampaknya terbagi mengenai bagaimana cara untuk meresponnya, dan gagal upaya pemerintah untuk memberikan bentuk

dukungan yang nyata (pasukan dan senjata), selain bantuan finansial, untuk pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dalam perang di Teluk Persia hanya memperkuat tampilan kebingungan pemerintah Jepang. Di Amerika Serikat, ketidakmampuan Jepang untuk bertindak secara meyakinkan selama berbulan-bulan yang mengarah pada perang dipandang dengan rasa frustrasi yang semakin besar. Bagi kebanyakan orang Amerika Serikat, ketidakhadiran nyata pasukan Jepang di Teluk menunjukkan bahwa Jepang sekali lagi menjadi *free rider* Amerika Serikat, namun kali ini ongkosnya akan dibayar dengan jiwa (nyawa) orang Amerika Serikat, bukan hanya dengan uang pajak orang Amerika Serikat. Emosi dengan cepat mempengaruhi reaksi publik, dan ejekan Amerika Serikat pada Jepang dan Jerman sebagai *checkbook power* sebagian merupakan cerminan salah pengertian atas ketidakmampuan Amerika Serikat sendiri untuk mengambil peran sebagai polisi dunia.<sup>34</sup> Bagi orang yang telah berharap agar Jepang dan Amerika Serikat bisa memperluas kerjasama bilateral mereka menjadi suatu kemitraan global, krisis Teluk 1990 merupakan bagian yang mengecewakan dalam sejarah hubungan tersebut.

Namun, hal yang mendasari reaksi-reaksi ini dalam menghadapi krisis Teluk adalah permasalahan-permasalahan yang lebih luas mengenai sifat keamanan kolektif (*collective security*) setelah berakhirnya Perang Dingin. Perbedaan dalam pendekatan Amerika Serikat dan Jepang terhadap peran-peran mereka dalam konflik tersebut bisa dipahami lewat suatu pengamatan kerjasama keamanan bilateral. Perang Teluk telah menempatkan tuntutan baru pada struktur aliansi Amerika Serikat pasca perang di suatu saat ketika ketidakpuasan

Amerika Serikat dengan biaya-biaya aliansi tersebut semakin tinggi dan keuntungan dari kerjasama strategi semakin menurun saat Perang Dingin berakhir. Namun reaksi Amerika Serikat dan Jepang dapat disebabkan oleh pola-pola kerjasama keamanan yang dikembangkan dalam konteks Perang Dingin. Apakah kerjasama ini akan terus bisa dilakukan atau tidak akan bergantung pada bentuk yang diambil tatanan keamanan baru ini dan kemampuan Amerika Serikat dan Jepang untuk melanggengkan dukungan domestik untuk aliansi tersebut.

### Persepsi Jepang

Perubahan lingkungan strategis kawasan di atas sangat tidak menguntungkan bagi Jepang. Jepang dihadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan dan membuatnya merasa *insecure*. Situasi ini memaksa Jepang untuk mengkaji ulang kebijakannya. Pada saat dimulainya Perang Teluk (1991), para elit politik Jepang cenderung berpikir bahwa era pasca Perang Dingin akan banyak menimbulkan konflik. Oleh karenanya, para elit politik (khususnya dari LDP-*Liberal Democratic Party*) semakin berkepentingan mencari ide mengenai internasionalisasi Jepang, melalui suatu kontribusi internasional (*kokusai koken*) dalam kerangka misi perdamaian (*peacekeeping operation*) PBB.<sup>35</sup> Para elit politik melakukan banyak upaya untuk melegitimasi peran internasional SDF menjadi kontributor personil militer dalam operasi-operasi perdamaian PBB di area-area konflik untuk menunjukkan eksistensi dan status kekuatan besar Jepang, dengan berharap akan mendapatkan semacam penghargaan sekaligus pengakuan politik (*prestise*) oleh negara-negara yang bergabung dengan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dalam Perang Teluk 1991.

Namun, pada awalnya muncul masalah serius mengenai cara dan sarana bagi pelaksanaan kontribusi internasional Jepang pada 1990-an. Hal ini terkait erat dengan permasalahan bagaimana cara menyelesaikan kesenjangan antara kepentingan kebijakan domestik dan luar negeri saat Jepang memberikan kontribusi internasionalnya, dan mengenai bagaimana cara menghindari pendekatan-pendekatan kebijakan yang tidak konsisten. Para pemimpin LDP sangat ingin menjadikan Jepang sebagai kekuatan besar dalam makna tradisional tanpa melakukan upaya besar untuk memperbaiki citra ketidakkonsistenan Jepang di dunia luar.<sup>36</sup> Mereka menganggap bahwa partisipasi dalam misi perdamaian PBB merupakan peran alami yang dapat diambil dalam tatanan dunia yang berubah dan merupakan cara yang paling memungkinkan bagi Jepang untuk menguji kemampuan militernya (SDF) di luar negeri tanpa menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar dari negara-negara tetangganya di Asia.

RUU PKO (*International Peace Cooperation Law*) yang diajukan pada 1991 jelas diarahkan untuk lebih dari sekedar komitmen non-militer pada wilayah konflik, tetapi untuk membuka jalan bagi Jepang dalam berpartisipasi pada aktifitas-aktifitas militer di Teluk.<sup>37</sup> Pada 12 Oktober 1991, PM. Toshiki Kaifu di depan Diet mengatakan:

“...Kami tidak boleh pernah lupa bahwa Jepang adalah salah satu negara yang paling diuntungkan dari perdamaian dunia. Jepang, suatu negara dagang yang miskin sumber daya, akan mampu untuk terus menikmati kemakmuran hanya jika perdamaian dunia terpelihara... Pemberian kontribusi pada upaya-upaya

untuk memelihara perdamaian dunia adalah harga alami dan tidak bisa dihindarkan yang muncul dari posisi internasional Jepang.”<sup>38</sup>

Perubahan persepsi terhadap tatanan dunia dari para elit politik juga sangat terkait dengan semakin tingginya perasaan nasionalisme (*Japanism*), dan mereka berupaya melegitimasi SDF dalam konteks internasional sebagai persyaratan yang diperlukan untuk suatu kekuatan besar. Jadi internasionalisasi bagi Jepang berarti memaksimalkan status sebagai kekuatan besar dalam politik global. Kebijakan internasionalisasi Jepang setelah krisis Teluk menunjukkan hal ini. Terlepas dari sikap yang masih berhati-hati dan kabur dalam opini publik domestik, pemerintah Jepang sedang melakukan upaya-upaya serius untuk mengubah kebijakan-kebijakan keamanan sebelumnya.

Pada 6 Juni 1991, LDP membentuk suatu “Kelompok Studi Khusus mengenai Peran Jepang dalam Komunitas Internasional” yang dipimpin oleh Sekjen LDP Ichiro Ozawa.<sup>39</sup> Hasil kajian yang dilaporkan pada LDP (20 Januari 1992) menyebutkan tiga hal penting, yaitu pertama, agar Jepang sebaiknya mengambil tanggung jawab dan peran yang lebih besar dalam keamanan internasional setelah Perang Dingin. Kedua, komisi ini mengusulkan agar Jepang sebaiknya mengadopsi suatu kebijakan keamanan yang aktif, untuk memberi kontribusi pada keamanan dan kemakmuran dunia. Ketiga, komisi ini menyarankan agar Jepang sebaiknya mengirimkan SDF untuk berpartisipasi dalam pasukan PBB yang ditetapkan dalam Pasal 43 Piagam PBB. Lebih lanjut disebutkan bahwa kontribusi seperti itu tidak akan bertentangan dengan

Konstitusi Jepang, khususnya Pasal 9 yang melarang penggunaan kekuatan fisik untuk menyelesaikan konflik internasional.<sup>40</sup> Poin penting dari laporan ini adalah bahwa kebijakan LDP (pemerintah) sebelumnya dalam masalah keamanan nasional sebaiknya diubah untuk beradaptasi dengan lingkungan internasional yang berubah.

Keputusan Jepang untuk berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB menunjukkan suatu adaptasi tambahan di dalam kerangka kebijakan yang sudah disepakati (*incremental adaptation within an agreed policy framework*).<sup>41</sup> Keputusan untuk mengirimkan SDF ke luar negeri untuk tujuan *peacekeeping* merupakan suatu langkah awal dalam proses bertahap dan berkelanjutan di mana Jepang telah secara berhati-hati memperluas cakupan aktifitas SDF melalui penambahan berturut-turut dalam daftar aktifitas yang diizinkan bagi SDF berdasarkan interpretasi dari Pasal 9 Konstitusi Jepang.<sup>42</sup> Interpretasi pemerintah atas Pasal 9 yang terkait dengan pengiriman SDF ke luar negeri pada kenyataannya merupakan interpretasi yang sudah ada sejak dulu, dan menyatakan bahwa merupakan hal yang tidak konstitusional untuk mengirimkan SDF ke negara lain untuk tujuan penggunaan kekuatan (*for the purpose of using forces*), karena hal ini melebihi batas minimum yang diperlukan untuk pembelaan diri. Namun tidak ada larangan khusus baik konstitusi, hukum maupun yang lainnya dalam kasus-kasus di mana pengiriman SDF bukan untuk tujuan penggunaan senjata. Karena itu, penempatan untuk tujuan-tujuan lain seperti *peacekeeping* menjadi dimungkinkan berdasarkan Konstitusi, walaupun dalam UU SDF sendiri tidak (belum) mempunyai klausa yang tepat untuk mengizinkan pengiriman SDF ke luar negeri.

## Penutup

Pelaksanaan peran SDF Jepang dalam misi perdamaian PBB menegaskan sikap internasional Jepang yang dominan sebagai negara yang reaktif.<sup>43</sup> Rangkaian peristiwa aktual yang mencapai puncaknya pada keberhasilan diloloskannya RUUPKO (1992) menggambarkan pola klasik “tekanan-respon” yang ditunjukkan oleh banyak sekali perilaku internasional Jepang. Keputusan untuk mengirim SDF ke luar negeri untuk misi perdamaian (*peacekeeping*) bukan menunjukkan suatu sikap yang spontan, unilateral, dan tanpa persiapan bagi komunitas internasional, tetapi melalui proses yang lama dan lambat.

Meskipun dalam menjustifikasi keputusan peran internasional SDF, pemerintah Jepang tidak membesar-besarkan pentingnya tekanan Amerika Serikat, namun faktor Amerika Serikat tetap merupakan elemen kuat yang memotivasi upaya berkelanjutan untuk mendapatkan inisiatif yang diperlukan secara politik sehingga memungkinkan kontribusi fisik untuk keamanan internasional. Namun pada saat yang sama, inisiatif peran internasional SDF juga dirancang untuk melepaskan tekanan Amerika Serikat pada Jepang, sehingga Jepang bisa mengalihkan *burden sharing* Amerika Serikat di bawah “kedok” kontribusi internasional.<sup>44</sup>

Walaupun tekanan eksternal merupakan hal penting yang menyebabkan pemerintah Jepang mengirim SDF dalam *peacekeeping operation*, hal tersebut juga disertai dorongan internal yang mempunyai alasan sendiri untuk menginginkan pengiriman SDF ke luar negeri dalam misi perdamaian PBB. Selain untuk menyenangkan Amerika

Serikat menjadi prioritas dalam tujuan kementerian luar negeri (MOFA, *ministry of foreign affairs*), MOFA mempunyai agenda terpisah sendiri yang berkaitan dengan pemajuan kepentingan nasional Jepang. Agenda ini mencakup peningkatan posisi internasional Jepang, meningkatkan profil politiknya dalam urusan internasional, memenangkan rasa hormat internasional yang lebih besar bagi Jepang sebagai suatu negara yang mempunyai perhatian tinggi dalam urusan internasional, dan jika memungkinkan, mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Bagi sekelompok tertentu dalam LDP, keinginan mereka adalah agar Jepang dapat diterima oleh masyarakat internasional sebagai suatu “negara normal” (*normal state*) atau “pemain utama” (*regular player*) dalam urusan internasional. Salah seorang anggota kelompok ini, Ichiro Ozawa, menegaskan bahwa konsep “pemain utama” adalah kemampuan negara untuk mengirim pasukannya ke luar negeri. Lebih lanjut dia mengemukakan, pengiriman SDF ke luar negeri untuk misi perdamaian merupakan langkah vital dan konstruktif dalam menuju rehabilitasi dan penerimaan internasional terhadap Jepang sebagai kekuatan internasional yang kredibel.<sup>45</sup>

Keputusan pengiriman SDF dalam misi perdamaian PBB bagi Jepang merupakan suatu tindakan yang mencerminkan pandangan terhadap dunia dan cara Jepang untuk memahami dan berhubungan dengan komunitas internasional. Hal ini disebut sebagai “akomodasi situasional” (*situational accommodation*), suatu keinginan untuk menilai secara benar kecenderungan yang terjadi di sekitar dan melakukan penyesuaian yang diinginkan untuk menghindari isolasi internasional serta untuk memfasilitasi

penerimaan internasional. Oleh karena itu, sebagian besar alasan pembenaran yang digunakan untuk mengirim SDF dalam misi perdamaian PBB adalah argumen mengenai berakhirnya Perang Dingin dan perubahan dramatis dalam lingkungan strategis keamanan global, yang memberikan Jepang prospek dan pilihan baru, yang harus direspon jika Jepang tidak ingin terus mendapatkan kritikan internasional.

#### Catatan Akhir:

- 1 Konsep *collective security* dalam perspektif militer terkait erat dengan konsep *common security*, yaitu suatu komitmen untuk hidup bersama, memperhitungkan kekhawatiran keamanan yang sah para anggota lainnya, dan bekerja secara kooperatif dalam berbagai cara untuk memaksimalkan tingkat ketergantungan di antara negara-negara anggotanya. Lihat dalam Gareth Evans, *Cooperation for Peace: The Global for the 1990s and Beyond* (St. Leonards: Allen & Unwin, 1993), hal. 15-16.
- 2 Menurut Barry Buzan, *arms race* diartikan sebagai "...self-stimulating military rivalry between states, in which their efforts to defend themselves militarily cause them to enhance the threats they pose to each other." Karakteristik dari pengertian *arms race* adalah adanya dinamika kompetisi dan interaksi di antara dua atau lebih aktor, dan juga adanya akuisisi persenjataan secara cepat. Lihat dalam Barry Buzan, *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations* (London: Macmillan for the International Institute for Strategic Studies, 1987), hal. 69.
- 3 Reinhard Drifte, *Japan's Foreign Policy in the 1990s: From Economic Superpower to What Power?* (London: Macmillan, 1996), hal. 53.
- 4 Pembahasan secara komprehensif mengenai konsep *security complex* lihat dalam Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era* (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991), hal. 186-229.
- 5 Bhuhindar Singh, "Japan's Post Cold War Security Policy: Bringing Back the Normal State," *Contemporary Southeast Asia*, Volume 24, No. 1 (April 2002), hal. 88.
- 6 Department of Defense, *Worldwide Distribution by Geographical Area*, Dec 31, 1981, and Dec 31, 1988 (Washington: US Government Printing Office), dalam Richard D. Fisher, "The Clinton's Early Defense Policy Toward Asia," *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. VI, No. 1 (Summer 1994), hal 104.
- 7 *Ibid.*
- 8 Stanley B. Weeks and Charles A. Meconis, *The Armed Forces of the USA in the Asia-Pacific Region* (NSW Australia: Allen & Unwin, 1999), hal. 30.
- 9 *Ibid.*
- 10 US Departement of Defense, *A Strategic Framework for the Asian Pacific Rim: Looking Toward the 21st Century* (Washington, DC: Departement of Defense, April 18, 1990), hal. 15-17.
- 11 US Departement of Defense, *A Strategic Framework for the Asian Pacific Rim: Report to Congress 1992* (Washington, DC: Departement of Defense, 1992), hal. 22.
- 12 *Ibid.*
- 13 Richard D. Fisher, *op. cit.*, hal. 106.
- 14 Riri Dwianto, "Kerja Sama Keamanan Asia Timur," dalam Bantarto Bandoro (penyunting), *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik* (Jakarta: CSIS, 1996), hal. 182-183.
- 15 *White Paper of Japan 1992-1993*, hal. 69.
- 16 Reinhard Drifte, *op.cit.*, hal. 55-56.
- 17 *Ibid.*
- 18 Jing-dong Yuan and Yuchao Zhu, "Sizing Up Chinese Military Buildup: The Limitations to Defense Modernization," *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. VIII, No. 1 (Summer 1996), hal. 231.
- 19 Barbara Opall, "Study Rings Alarm on PLA Budget," *Defense News*, May 29 - June

- 4, 1995, hal. 1-37 dalam Jing-dong Yuan and Yuchao Zhu, *ibid.*
- <sup>20</sup> Choon Kun Lee, "Arms Buildup Phenomena in East Asia: Causes and Patterns," *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. XII, No. 1 (Summer 2000), hal. 161.
- <sup>21</sup> Patrick Tyler, "Chinese Get Top Russian Jets as Military Leaders Win Round," *New York Times* (7 Februari 1996).
- <sup>22</sup> *Ibid.*
- <sup>23</sup> Tai Ming Cheung, "China's Buying Spree," *Far Eastern Economic Review* (8 July 1993).
- <sup>24</sup> Lihat dalam You Ji, *The Armed Forces of China* (NSW Australia: Allen & Unwin, 1999), hal. 67-69.
- <sup>25</sup> Robert Karniol, "China to Buy Russian 'Kilo' Submarines," *Jane's Defense Weekly* (19 November 1994), hal. 1.
- <sup>26</sup> Jung-Hoon Lee and Il Hyun Cho, "The North Korean Missiles: A Military Threat or Survival Kit?," *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. XII, No. 1 (Summer 2000), hal. 137.
- <sup>27</sup> *Ibid.*
- <sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 138
- <sup>29</sup> *Ibid.*
- <sup>30</sup> Bahasan mengenai uji coba rudal Korea Utara pada 1998 dan dampaknya terhadap keamanan Jepang dapat dilihat dalam Bhuhindar Singh, *The North Korean Missiles Launch and the 'Normalization' of Japanese Statehood*, *Issues and Studies*, Vol. 37, No. 3 (May/June 2001), hal. 142-162.
- <sup>31</sup> *Defense of Japan 2000*, hal. 31.
- <sup>32</sup> Susan J. Pharr, *Japan's Defensive Foreign Policy and the Politics of Burden sharing*, dalam Gerald L. Curtis, ed., *Japan's Foreign Policy After the Cold War: Coping with Change* (New York: M.E. Sharpe, 1992), hal. 236-237.
- <sup>33</sup> *Ibid.*
- <sup>34</sup> Sheila Smith, "The US-Japan Alliance in 1991: Cold War Dynamics and Postwar Legacies," *Japan Review of International Affairs*, Volume 5 (Special Issues, 1991), hal. 63.
- <sup>35</sup> Takehiko Kamo, "National Security in Japan: Struggling between Continuity and Change," *Pacific Focus*, Volume VII, No. 2 (Fall 1992), hal. 101-102.
- <sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 102.
- <sup>37</sup> *Ibid.*
- <sup>38</sup> *Ibid.*
- <sup>39</sup> Ichiro Ozawa merupakan salah satu tokoh paling vokal sayap LDP yang mendukung partisipasi SDF dalam operasi Perang Teluk. Pemikiran-pemikiran dia dapat dilihat dalam tulisannya, *Ichiro Ozawa, Blueprint for A New Japan: the Rethinking of A Nation (Nihon Kaizo Keikaku)*, translated by Louisa Rubinfien (Tokyo: Kodansha International, 1994).
- <sup>40</sup> Barbara Wanner, "Japan Views Leadership Opportunities Through the United Nations," *Japan Economic Institute Report*, No. 10A (March 13, 1992), hal. 1-3.
- <sup>41</sup> Eugene Brown, "Contending Paradigms of Japan's International Role: Elite Views of the Persian Gulf Crisis," *Journal of North-east Asian Studies* (Spring 1991), hal. 16.
- <sup>42</sup> Aurelia George, "Japan's Participation in UN Peacekeeping Operations: Radical Departure or Predictable Response?" *Asian Survey*, Volume XXXIII, No. 6 (June 1993), hal. 562.
- <sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 563.
- <sup>44</sup> Jiro Yamaguchi, "The Gulf War and the Transformation of Japanese Constitutional Politics," *Journal of Japanese Studies*, Volume 18, No. 1 (1992), hal. 169-170.
- <sup>45</sup> *Ibid.*

#### Daftar Pustaka

- Bandoro, Bantarto (penyunting). *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Brown, Eugene. "Contending Paradigms of Japan's International Role: Elite Views of the Persian Gulf Crisis."

- Journal of Northeast Asian Studies* (Spring 1991).
- Byungki, Kim. "North Korea's Nuclear Policy in the Year 2000: Sources, Strategy, and Implications for the Korean Peninsula." *The Journal of East Asian Affairs*, Volume VII, No. 1 (Winter/Spring 1993).
- Buzan, Barry. *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*. London: Macmillan for the International Institute for Strategic Studies, 1987.
- \_\_\_\_\_. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. New York: Harvester Wheatsheaf, 1991.
- Curtis, Gerald L. ed. *Japan's Foreign Policy After the Cold War: Coping with Change*. New York: M.E. Sharpe, 1992.
- Defense of Japan 1994*.
- Defense of Japan 2000*.
- Drifte, Reinhard. *Japan's Foreign Policy in the 1990s: From Economic Superpower to What Power?*. London: Macmillan, 1996.
- Evans, Gareth. *Cooperation for Peace: The Global for the 1990s and Beyond*. St. Leonards: Allen & Unwin, 1993. *Far Eastern Economic Review*. 8 Juli 1993.
- Fisher, Richard D. "The Clinton's Early Defense Policy Toward Asia." *The Korean Journal of Defense Analysis*. Volume VI, No. 1 (Summer 1994).
- George, Aurelia. "Japan's Participation in UN Peacekeeping Operations: Radical Departure or Predictable Response?" *Asian Survey*. Volume XXXIII, No. 6 (June 1993).
- Ji, You. *The Armed Forces of China*. NSW Australia: Allen & Unwin, 1999.
- Kamo, Takehiko. "National Security in Japan: Struggling between Continuity and Change." *Pacific Focus*. Volume VII, No. 2 (Fall 1992).
- Lee, Choon Kun. "Arms Buildup Phenomena in East Asia: Causes and Patterns." *The Korean Journal of Defense Analysis*. Volume XII, No. 1 (Summer 2000).
- Lee, Jung-Hoon and Il Hyun Cho. "The North Korean Missiles: A Military Threat or Survival Kit?" *The Korean Journal of Defense Analysis*. Vol. XII, No. 1 (Summer 2000).
- New York Times*. 7 Februari 1996
- Ozawa, Ichiro. *Blueprint for A New Japan: the Rethinking of A Nation (Nihon Kaizo Keikaku)*. translated by Louisa Rubinien. Tokyo: Kodansha International, 1994.
- Purrington, Courtney. "Tokyo's Policy Responses During the Gulf Crisis." *Asian Survey*. Volume 31, No. 4 (April 1992).
- Singh, Bhubhinder. "The 1998 North Korean Missile Launch and the Normalization of Japanese Statehood." *Issues and Studies: A Journal of Chinese Studies and International Affairs*. Volume 37, No. 3 (May/June 2001).
- \_\_\_\_\_. "Japan's Post-Cold War Security Policy: Bringing Back the Normal State." *Contemporary Southeast Asia*. Volume 24, No. 1 (April 2002).
- Smith, Sheila. "The US-Japan Alliance in

- 1991: Cold War Dynamics and Postwar Legacies." *Japan Review of International Affairs*. Volume 5 (Special Issues, 1991).
- Song, Young-sun. "Japanese Peacekeeping Operations: Yesterday, Today, and Tomorrow." *Asian Perspective: A Journal of Regional and International Affairs*. Volume 20, No. 1 (Spring-Summer 1996).
- US Department of Defense. *A Strategic Framework for the Asian Pacific Rim: Looking Toward the 21st Century*. Washington, DC: Department of Defense, April 18, 1990.
- US Department of Defense. *A Strategic Framework for the Asian Pacific Rim: Report to Congress 1992*. Washington, DC: Department of Defense, 1992.
- Warner, Barbara. "Japan Views Leadership Opportunities Through the United Nations." *Japan Economic Institute Report*. No. 10A (March 13, 1992).
- Weeks, Stanley B. and Charles A. Meconis. *The Armed Forces of the USA in the Asia-Pacific Region*. NSW Australia: Allen & Unwin, 1999.
- White Paper of Japan 1992-1993*.
- Yamaguchi, Jiro. "The Gulf War and the Transformation of Japanese Constitutional Politics." *Journal of Japanese Studies*. Volume 18, No. 1 (1992).
- Yuan, Jing-dong and Yuchao Zhu. "Sizing Up Chinese Military Buildup: The Limitations to Defense Modernization." *The Korean Journal of Defense Analysis*. Volume VIII, No. 1 (Summer 1996).